

TESIS

**ANALISIS DETERMINAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**ANALYSIS OF COMMUNITY WELFARE DETERMINANTS
IN SOUTH SULAWESI PROVINCE**

CICI MAHMUT



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

TESIS

ANALISIS DETERMINAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

ANALYSIS OF COMMUNITY WELFARE DETERMINANTS IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

Disusun dan diajukan oleh:

**CICI MAHMUT
A032191003**



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS DETERMINAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh

**CICI MAHMUT
A032191003**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister **Ekonomi Pembangunan dan
Perencanaan** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 16 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Fatmawati, SE., M.Si CWM@
NIP. 19640106 198803 2 001

Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA., CWM@
NIP. 19630516 199003 1 001

Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Dr. Indraswati Tri Abdireviane, SE., MA., CWM@
NIP. 19651012 199903 2 001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 19640205 198810 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Cici Mahmut**

NIM : A032191003

Program Studi : Magister Ekonomi Pembangunan dan
Perencanaan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul: **Analisis Determinan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan** adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 Agustus 2022

Yang menyatakan,

A handwritten signature in blue ink is written over a red 10000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. A serial number '135CAJX969302230' is visible at the bottom of the stamp.

Cici Mahmut

PRAKATA

Segala puja dan puji hanya untuk Allah SWT, dzat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang tak henti-hetinya memberikan limpahan rahmat dan hidayahNya kepada seluruh umat manusia. Berkat izin-Nya pula lah penulis mampu menyelesaikan Tesis yang berjudul “ANALISIS DETERMINAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN”. Tak lupa pula penulis hanturkan shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sang pejuang kemanusiaan, pembela kaum tertindas, yang telah menjadi suri tauladan umat menuju gerbang pencerahan, semoga kelak penulis mampu mengikuti jejak perjuangan Beliau. Aamiin. Tesis ini merupakan sebuah karya penulis yang masih jauh dari sempurna, sebuah tulisan yang bahkan oleh penulis sendiripun tak akan menyangkal untuk mengakuinya sebagai sebuah karya yang belum layak baca. Akan tetapi sebagai sebuah proses awal, penulis berharap tulisan ini mampu memberikan banyak pelajaran dan mampu menjadi pemantik semangat dalam melahirkan karya-karya selanjutnya. Karya yang mendidik, karya yang jujur, dan tentu saja karya yang telah layak baca. Harapan itu tidak hanya untuk penulis sendiri tapi untuk para pembaca sekalian, baik yang sengaja maupun yang secara tak sengaja membaca Tesis ini. Banyak kendala yang penulis hadapi dalam rangka penyusunan tesis ini, dan hanya berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihaklah penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya.

Dalam kesempatan ini, apresiasi setinggi-tingginya tak lupa penulis ucapkan kepada para pembimbing yaitu ibu Dr. Fatmawati, SE.,M.Si., CWM® selaku pembimbing I dan bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE.,MA., CWM® selaku pembimbing II, terima kasih dengan tulus telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran selama penulis menyusun tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Ekonomi Unhas, Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. Beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unhas. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Indraswati Tri Abdireviane, SE., MA., CWM® sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Terimah kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen yang pernah mengajar penulis pada Program S2 Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Unhas dan kepada seluruh anggota tim penguji: Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid Paddu, SE., MA., Bapak Dr. Madris, DPS, M.Si., serta Ibu Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si. yang telah meluangkan waktu dalam meneliti keabsahan dan memberikan kritik serta saran yang sangat berguna atas penyempurnaan tesis ini. Terima kasih penulis ucapkan juga kepada seluruh staf akademik Pasca Ekonomi Unhas yang dengan senang hati membantu penulis dalam menyelesaikan urusan akademik.

Selama menjalani pendidikan magister di Universitas Hasanuddin tentunya penulis tidak lupa mengucapkan rasa hormat dan penuh kepatuhan serta terima kasih yang tak terhingga atas keikhlasan kedua orangtua, Ayahanda Mahmud dan Ibunda Muhaeni dalam mendidik, membesarkan, dan mendoakan anaknya bisa menjadi seorang magister. Penulis juga sangat bersyukur dan merasa beruntung karena tidak hanya sebagai orangtua, keduanya juga sangat berperan dalam memberikan petunjuk, doa, saran, motivasi dan telah memberikan niat dan ruh suci dan keikhlasan dalam menuntut ilmu sehingga penulis dapat mencapai cita-cita. Terima kasih kepada saudara-saudara saya yang saya banggakan dan sayangi karena selama penulis menempuh pendidikan di jenjang magister ini penulis banyak mendapatkan dukungan dari saudara-saudara tercinta baik berupa dukungan moril maupun materil. Teruntuk kakak saya Aziz Thaba, S.Pd., M.Hum. sosok panutan saya dikeluarga terima kasih untuk bimbingan, ilmu dan dukungannya selama penulis menempuh pendidikan semoga kelak saya bisa seperti kakak bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang membantu memberikan dukungan dan doa hingga saat ini, teruntuk sahabat-sahabat seperjuangan saya sekaligus member dari grup pejuang wisuda Nursinah Amrullah, SE., M.Si., Ririn Mardhani Syakur, SE., M.Si., Muh. Zulfi Qadri, SE., M.Si dan Kak Saleh Rahim serta rekan-rekan MEPP angkatan 2019. Buat rekan-rekan yang sedang berjuang semoga dimudahkan segala urusannya dan segera menyandang gelar barunya, Aamiin.

Maha Suci Engkau Ya Allah tidaklah ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau telah beritahukan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui segala hikmah. Engkau memberi hikmah kepada siapa saja yang dianugrahi karunia yang banyak dan hanya orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Wallahu"alam.

Makassar, Agustus 2022



Cici Mahmut

ABSTRAK

Cici Mahmut. *Analisis Determinan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh Fatmawati dan Anas Iswanto Anwar).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan di 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan analisis struktural model menggunakan software SPSS. Periode penelitian ini adalah 2010-2019.

Penelitian ini menggunakan data panel dengan variabel pengeluaran pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat serta variabel pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel intervening.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, namun secara tidak langsung pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, namun secara tidak langsung investasi swasta tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Kata Kunci: Kesejahteraan Masyarakat, Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta

ABSTRACT

Cici Mahmut. *Analysis of Determinants of Community Welfare in South Sulawesi Province* (supervised by Fatmawati and Anas Iswanto Anwar).

This study aims to examine and analyze the effect of government spending and private investment on people's welfare, either directly or indirectly through economic growth and employment in South Sulawesi Province. This research was conducted in 24 regencies/cities in South Sulawesi Province with a structural analysis of the model using SPSS software. The period of this research is 2010-2019.

This study uses panel data with the variables of government expenditure, private investment, economic growth and employment as the variables that affect people's welfare and the variables of economic growth and employment as intervening variables.

The results of this study show that government spending has a positive and significant direct effect on the welfare of the people of South Sulawesi Province, but indirectly government spending does not have an influence on people's welfare through economic growth and employment. Private investment has a positive and significant direct effect on the welfare of the people of South Sulawesi Province, but indirectly private investment has no effect on the welfare of the community through economic growth and employment.

Keywords: Community Welfare, Economic Growth, Employment Absorption, Government Expenditure and Private Investment

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Teoretis.....	14
2.1.1 Teori Kesejahteraan Masyarakat.....	14
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia	15
2.1.3 Teori Ketenagakerjaan	16
2.1.4 Teori Permintaan Tenaga Kerja.....	17

2.1.5 Penyerapan Tenaga Kerja.....	18
2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi.....	20
2.1.7 Pengeluaran Pemerintah.....	21
2.1.8 Teori Investasi.....	23
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	25
2.2.1 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat.....	25
2.2.2 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.....	28
2.2.3 Hubungan antara Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat.....	29
2.3 Kajian Empiris	31
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	40
3.1 Kerangka Konseptual.....	40
3.2 Hipotesis	42
BAB IV METODE PENELITIAN	44
4.1 Pendekatan Penelitian.....	44
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	44
4.3 Populasi dan Sampel.....	44
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	44
4.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	45
4.6 Metode Analisis	45
4.7 Definisi Operasional	48
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49

5.1 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan.....	49
5.2 Deskripsi Variabel Penelitian	50
5.3 Deskripsi Hasil Penelitian	62
5.4 Pengujian Hipotesis	67
5.5 Pembahasan	71
BAB VI PENUTUP	85
6.1 Kesimpulan.....	85
6.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pertumbuhan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2019 (Persen)	4
5.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2010-2019 (Persen).....	50
5.2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2010-2019 (000 Rp).....	53
5.3 Data Realisasi Investasi Swasta Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019 (dalam juta rupiah).....	55
5.4 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang bekerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019 (Jiwa)	58
5.5 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Persen).....	60
5.6 Pengaruh antar Variabel	62
5.7 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel Independen ke Variabel Dependen	65
5.8 Total Pengaruh Variabel Penelitian.....	66
5.9 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019.....	3
3.1 Kerangka Konseptual.....	41
5.1 Model Analisis Data Penelitian.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

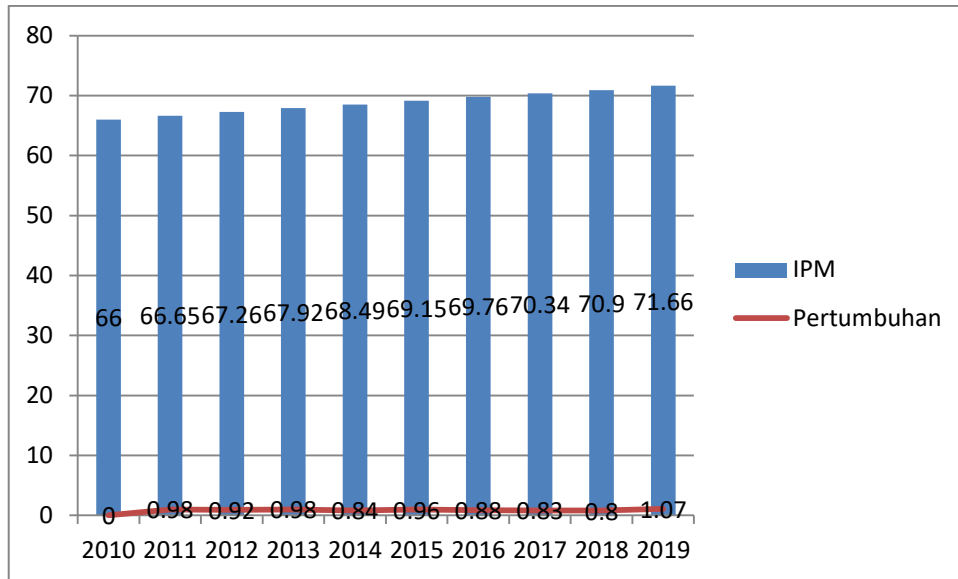
1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, pencapaian kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi. Di Indonesia sendiri, pencapaian kesejahteraan juga merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana yang dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” Berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Menurut Rochon & Rossi (2021) pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan perekonomiannya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan yang semakin tinggi dan kemajuan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat dan kemakmuran masyarakat semakin tinggi.

United Nations Development Programme (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator dalam melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life*

expectancy at birth), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup (BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2020). Ketiga indikator tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara (Ariza, 2016).

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu bagian dari wilayah Republik Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui pembangunan di berbagai bidang. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat kualitas manusia dalam suatu daerah yang berguna untuk memajukan daerah tersebut. Kualitas hidup masyarakat di suatu negara atau daerah tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2019

Gambar 1.1 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2010 hingga 2019 memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Perkembangan IPM menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Sulawesi Selatan. Dilihat dari trennya, IPM Sulawesi Selatan mengalami kenaikan. Dalam lima tahun saja (2015-2019), terjadi kenaikan 2,51 poin.

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pertumbuhan IPM di Sulawesi Selatan cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Pada periode 2016-2017, pembangunan manusia di Sulawesi Selatan berhasil tumbuh sebesar 0,90 persen.

Tabel 1.1 Pertumbuhan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 (Persen)

Kabupaten/Kota	IPM				
	2015	2016	2017	2018	2019
Selayar	64,32	64,95	65,39	66,04	66,91
Bulukumba	65,58	66,46	67,08	67,7	68,28
Bantaeng	66,2	66,59	67,27	67,76	68,3
Jeneponto	61,61	61,81	62,67	63,33	64
Takalar	64,07	64,96	65,48	66,07	66,94
Gowa	66,87	67,7	68,33	68,87	69,66
Sinjai	64,48	65,36	65,8	66,24	67,05
Maros	67,13	67,76	68,42	68,94	69,5
Pangkep	66,65	66,86	67,25	67,71	68,29
Barru	68,64	69,07	69,56	70,05	70,6
Bone	63,11	63,86	64,16	65,04	65,67
Soppeng	65,33	65,95	66,67	67,6	68,26
Wajo	66,9	67,52	68,18	68,57	69,05
Sidrap	69	69,39	69,84	70,6	71,05
Pinrang	69,24	69,42	69,9	70,62	71,12
Enrekang	70,03	70,79	71,44	72,15	72,66
Luwu	68,11	68,71	69,02	69,6	70,39
Tana Toraja	65,75	66,25	66,82	67,66	68,25
Luwu Utara	67,44	67,81	68,35	68,79	69,46
Luwu Timur	70,43	70,95	71,46	72,16	72,8
Toraja Utara	66,76	67,49	67,9	68,49	69,23
Kota Makassar	79,94	80,53	81,13	81,73	82,25
Kota Parepare	76,31	76,48	76,68	77,19	77,62
Kota Palopo	76,27	76,45	76,71	77,3	77,98
Sulawesi Selatan	69,15	69,76	70,34	70,9	71,66

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2020

Tabel di atas memperlihatkan tren Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, secara keseluruhan IPM di Sulawesi Selatan memperlihatkan tren yang terus meningkat pada periode 2011-2019. Peningkatan IPM juga diikuti seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun jika dilihat dari IPM di 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih mengalami perbedaan yang signifikan. Persebaran laju IPM di

Provinsi Sulawesi Selatan belum merata. IPM Kota Makassar yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan berada pada peringkat pertama dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yaitu sebesar 82,25 persen pada tahun 2019. Kota Palopo berada pada peringkat kedua yaitu sebesar 77,98 persen dan Kota Parepare berada pada peringkat ketiga dengan IPM sebesar 77,62 persen. Serta ada tiga daerah dengan IPM terendah yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Selayar dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun IPM di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan, namun masih terdapat gap antar Kabupaten/Kota.

Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pembangunan merupakan upaya perubahan struktural yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan penduduk, tujuan dari pembangunan ekonomi sendiri untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Mengeksplorasi tantangan pertumbuhan ekonomi yang dihadapi oleh ekonomi yang melimpah dalam tenaga kerja dan sumber daya alam dalam ekonomi global yang semakin maju, Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai sasaran tujuan pembangunan adalah dengan mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, serta penyediaan lapangan pekerjaan.

Menurut Schumpeter dalam Boediono (2012) Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyak faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara teknologi itu sendiri. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, namun

memberikan indikasi sejauh mana aktifitas perekonomian yang terjadi pada periode tertentu yang telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Masalah penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi angka pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan, kriminalitas, dan fenomena-fenomena sosial-ekonomi di masyarakat. Penyerapan tenaga kerja yaitu jumlah orang yang bekerja di berbagai sektor, jumlah dan komposisi tenaga kerja akan secara terus menerus mengalami perubahan seiring dengan perubahan demografi.

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu pendukung pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang dan mempunyai tujuan antara lain untuk menciptakan pembangunan ekonomi secara merata (Shimer, 2005). Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja, dengan skill dan kemampuan yang dimiliki, diharapkan nantinya penduduk usia muda akan terserap dalam pasar tenaga kerja. Namun seiring berkembangnya zaman dan memasuki era perdagangan bebas ternyata apa yang diharapkan tidaklah sesuai dengan kenyataannya. Ketidakeimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam hal ini supply lebih besar daripada demand tentunya menimbulkan masalah pengangguran.

Terjadinya pembukaan lapangan kerja merupakan salah satu langkah yang paling tepat dalam menentukan proses pertumbuhan menjadi semakin jelas. Akan tetapi proses ini harus diikuti oleh penyerapan tenaga kerja di semua sektor sebab kondisi ini akan berhadapan langsung dengan keadaan yang semakin memburuk apabila terjadi ledakan pengangguran yang tidak terserap oleh lapangan kerja yang memadai. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah adalah

dengan pertumbuhan penduduk yang besar dan ledakan tenaga kerja yang tidak terserap akan menimbulkan masalah keterbelakangan sehingga prospek pembangunan akan semakin melambat bahkan dapat dikatakan tidak terjadinya pembangunan yang semakin merata (Lusardi & Mitchell, 2011).

Tujuan otonomi daerah diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wegner dalam Soetrisno (1984) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan pemerintah dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi. Ini salah satu dari tujuan pelaksanaan otonomi daerah yang diimplementasikan pada pengeluaran belanja rutin. Kenaikan pengeluaran pemerintah yang direncanakan akan menyebabkan penambahan permintaan agregat, dimana permintaan agregat akan mendorong produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan juga akan meningkat. Kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan ketepatan arah investasi ke daerah-daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Swaramarinda & Indriani (2011) menyatakan kekuatan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia harus bisa mengidentifikasi sektor prioritas seperti pendidikan dan kesempatan kerja yang mempunyai potensi paling tinggi untuk meningkatkan pembangunan manusia. Pertumbuhan pendapatan adalah salah satu sebagai kontributor utama untuk langsung meningkat kemampuan individu dan akibatnya perkembangan manusia bangsa sejak ini merangkum perintah ekonomi atas sumber daya (Ranis, 2004).

Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran

pemerintah tersebut juga dipengaruhi oleh besarnya investasi. Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi, investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi dimasa mendatang (Hidayati, 2017). Investasi adalah langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Menurut Rostow bahwa setiap upaya untuk tinggal landas mengharuskan adanya mobilitas tabungan dalam dan luar negeri dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (Sari, Syechalad, & Sabri Abdul Majid, 2016).

Pertumbuhan ekonomi memang penting, strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih lengkap harus mengambil faktor yang relevan, dalam konteks desentralisasi, analisis subnasional dapat menjadi pendekatan instruktif untuk memeriksa pemerintahan lokal dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan (Balisacan & Hill, 2003). Pertumbuhan ekonomi, akan membuka lapangan kerja, menyerap angkatan kerja, yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan penduduk. Manusia yang berkualitas tinggi dan menguasai teknologi dapat menghasilkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Seran, 2017). Kebutuhan tenaga kerja juga akan memperluas kesempatan kerja serta berdampak terhadap naiknya penghasilan

masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakatpun meningkat, jika pertumbuhan ekonomi tinggi akan mengakibatkan aktivitas ekonomi dan semakin terbukanya kesempatan kerja. Kondisi semacam ini akan membawa konsekuensi logis terhadap terciptanya faktor penarik bagi penduduk daerah yang pertumbuhan dan tingkat pendapatan yang lebih rendah untuk mencari pekerjaan di daerah yang tingkat pendapatannya lebih tinggi (Suartha & Sudartha, 2017). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang ini mengandung tiga hal pokok yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Proses menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu akan terus mengalami perubahan, dalam pembangunan ekonomi tingkat pendapatan per kapita terus-menerus meningkat, sedangkan kenaikan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita (Adipuryanti & Sudibia, 2015).

Ariza (2016) mengatakan selain ketiga indikator IPM yang dapat mempengaruhi peningkatan IPM juga terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat IPM suatu wilayah yaitu ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah, apabila ketiga faktor tersebut dapat ditingkatkan maka IPM juga akan meningkat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan. Menurut Van den Berg (2016), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka panjang. Tiga komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi menurut Todaro dan Smith, yakni: (1) akumulasi modal; (2) pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja; dan (3) kemajuan teknologi.

teori Investasi Harrod-Domar, pembentukan modal atau investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan. Menurut Harrod-Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Pada kegiatan investasi terdapat hubungan yang erat terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru, karena akan memunculkan kegiatan produksi yang meningkat sehingga masyarakat yang terserap akan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, serta melihat bagaimana penyerapan tenaga kerja dalam memediasi hubungan antara variabel independen (pengeluaran pemerintah, investasi dan pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan periode 2010-2019. Dari gambar dan tabel yang tercantum, memberikan gambaran kondisi perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan yang mana kondisi tersebut ada yang berfluktuasi dan ada juga yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dengan kondisi perekonomian di Sulawesi Selatan seperti yang terlihat pada gambar dan tabel di atas, penulis juga tertarik terhadap teori dari beberapa ahli ekonomi yang telah mengembangkan beberapa teori tentang keterkaitan variabel dalam penelitian ini.

Beberapa bukti empiris berikut menjadi referensi dilakukannya penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Pratiwi & Indrajaya (2019) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan

tenga kerja. Sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah dan penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penyerapan tenaga kerja memediasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan penyerapan tenaga kerja tidak memediasi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Sulistiawati (2012) menemukan bahwa investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Kedua, investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Ketiga, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Keempat, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kelima, penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Awandari & Indrajaya (2016) menemukan bahwa infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dan investasi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat peluang untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Determinan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja?
2. Apakah investasi swasta berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi swasta terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan upah minimum.

2. Bagi Pemerintah daerah membantu dalam mengambil kebijakan dalam membantu memajukan pembangunan ekonomi melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja sebagai realisasi pengurangan permasalahan pengangguran dan terciptanya masyarakat yang sejahtera sebagai tujuan akhir dari pembangunan suatu wilayah.
3. Sebagai acuan bagi mahasiswa dan koleksi perpustakaan yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan penelitian dalam bidang kesejahteraan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoretis

2.1.1 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan bernegara yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (UU Nomor 11 Tahun 2009). Seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan sebagaimana disebutkan dalam pasal 28C UUD 1945 bahwa setiap manusia berhak mengembangkan diri dengan memenuhi kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan peran dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam UU nomor 11 Tahun 2009 dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Masyarakat sebagai sasaran penerima kesejahteraan harus mendukung upaya pemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab atas peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tingkat daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum merupakan tugas pokok dan tanggung jawab pemerintah

daerah. Dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa tugas utama pemerintah daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia sebagai Indikator Kesejahteraan Masyarakat

UNDP (*United Nations Development Programme*) pertama kali mempublikasikan konsep *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990 dan sejak saat itu IPM secara berkala dipublikasikan dalam suatu Laporan Pembangunan Manusia setiap tahunnya (BPS, 2015). Badan Pusat Statistik mendefinisikan pembangunan manusia sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau suatu proses meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek kehidupan masyarakat tersebut adalah usia yang panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), tingkat pendidikan atau pengetahuan yang memadai (*knowledge*) serta standar hidup layak (*decent standard of living*). UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*).

Pembangunan manusia di Indonesia diharapkan dapat terus meningkat, terutama setelah ditetapkannya peraturan otonomi daerah. Peraturan tentang otonomi daerah yang diamanahkan melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan program-program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran, agar indeks pembangunan manusia ikut meningkat.

Dalam katalog Indeks Pembangunan Manusia 2014, BPS menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Sebelum adanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara, ada beberapa indikator lain yang digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat suatu negara tersebut, misalnya Pendapatan Perkapita (PP), Paritas Daya Beli (PPP), Indeks Kualitas Hidup Fisik (PQLI). Indikator-indikator yang digunakan pada PP, PPP, PQLI, tidak begitu lengkap bila dibandingkan dengan metode yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM dikembangkan pada tahun 1990 oleh pemenang nobel dari India bernama Amartya Sen dan seorang ekonom asal Pakistan bernama Mahbub ul Haq dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economy. IPM tidak sekedar mengukur kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi atau sosial saja, namun IPM merupakan penggabungan antara pengukuran ekonomi dengan sosial, oleh sebab itu IPM dipakai sebagai salah satu ukuran untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi suatu negara oleh lembaga Pembangunan PBB.

2.1.3 Teori Ketenagakerjaan

Menurut Djojohadikusumo (1987), tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat kesempatan kerja. Menurut Basri & Subri (2003), tenaga kerja terdiri dari

angkatan kerja atau *labor force* dan bukan angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja itu sendiri terdiri dari (1) golongan bekerja, (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan, dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan lainnya. Menurut Undang-Undang (2003) tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat. Menurut David Ricardo dalam Sumarsono (2003) *labour* memegang peran penting dalam perekonomian. Sumber daya manusia atau *Human Resources* mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, sumberdaya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kebutuhan masyarakat.

2.1.4 Teori Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam suatu jenis pekerjaan sangat besar peranannya dalam menentukan upah di suatu perusahaan. Di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaan, upah untuk mencapai tingkat yang rendah. Sebaliknya di dalam sesuatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang terbatas tetapi permintaannya sangat besar, upah cenderung untuk mencapai tingkat yang tinggi (Sukirno, 2003).

Menurut Ehrenberg dan Smith dalam Mulyadi, Hardiani, & Umiyati (2018), tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dalam perekonomian, selain

tanah, modal, dan kewirausahaan. Seseorang akan mulai bekerja bila utility yang diterima lebih besar dari pada disutility tersebut menimbulkan penawaran tenaga kerja. Sementara itu, bagi pengusaha, nilai tambah output barang dan jasa haruslah minimal sama dengan upah yang dibayarkan bagi tenaga kerja. Dengan demikian lahirlah permintaan tenaga kerja. Kondisi saat penawaran dan permintaan bertemu disebut kondisi keseimbangan. Menurut mazhab ini, semua tenaga kerja akan terserap dalam perekonomian, atau akan selalu terjadi *full employment*. Hukum permintaan tenaga kerja pada dasarnya yaitu semakin rendah upah tenaga kerja maka akan semakin banyak permintaan tenaga kerja dalam suatu aktivitas produksi, dalam hal ini penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Upah tenaga kerja merupakan biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen, apabila upah tenaga kerja tinggi maka akan menyebabkan biaya produksi yang dikeluarkan akan semakin tinggi pula serta akan menurunkan tingkat keuntungan dari sisi produsen.

Jika tingkat upah mengalami peningkatan maka akan menyebabkan produsen melakukan berbagai alternatif yaitu mengurangi permintaan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja akan menurun atau dapat juga mencari tenaga kerja lain yang upahnya lebih rendah dari yang pertama. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah besarnya jumlah angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja, upah, dan kemampuan (*skill*) yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut (Bellante & Jackson, 1990).

2.1.5 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh

karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Kuncoro dalam Effendi, 2014).

Menurut Todaro & Smith (2003), penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerjaan atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda, demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha atau sektor tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha atau sektor dalam hal ini sektor industri (Sidik, 2012).

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi (Disnakertrans, 2002). Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja (Hellen, Mintarti, & Fitriadi, 2018).

Tenaga kerja merupakan faktor yang penting dalam proses produksi yang lain seperti tanah, modal dan lain-lain. Maka manusia merupakan penggerak bagi seluruh faktor-faktor produksi tersebut.

Istilah kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian pengertian kesempatan kerja adalah mencakup lapangan perkerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut (yang mengandung arti adanya kesempatan), kemudian timbul kebutuhan akan tenaga kerja.

Kebutuhan tenaga kerja nyata-nyata diperlukan oleh perusahaan atau lembaga menerima tenaga kerja pada tingkat upah, posisi, dan syarat kerja tertentu. Data kesempatan kerja secara nyata sulit diperoleh, maka untuk keperluan praktis digunakan pendekatan bahwa jumlah kesempatan kerja didekati melalui banyaknya lapangan kerja yang terisi yang tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja atau lebih tepat bila disebut Penyerapan Tenaga Kerja.

2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan *Gross Domestic Product* (GDP) tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Sadono Sukirno (2013), pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dari satu periode ke

periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.

Menurut Jhingan (2016), pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Artinya, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan macam-macam barang kepada penduduk dengan cara luas dan efisien yang memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

2.1.7 Pengeluaran Pemerintah

Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran berimbang yaitu suatu kondisi dimana penerimaan sama dengan pengeluaran. Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. Sedangkan anggaran defisit yaitu anggaran dimana pengeluaran lebih besar dari penerimaan. Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi. Sedangkan anggaran defisit digunakan jika

pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya, pengeluaran pemerintah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung (Anitasari & Soleh, 2012).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X - M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian (Afiat, 2015).

Pengeluaran pemerintah versi Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Dimana formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan tersebut disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Anitasari & Soleh, 2012).

Pengeluaran pemerintah dilihat dari belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak digunakan secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja pemeliharaan. Anggaran belanja tidak langsung memegang peran penting untuk menunjang

kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan tercapainya sasaran pada tujuan setiap tahap pembangunan. Pengeluaran pemerintah dilihat dari belanja langsung adalah belanja yang di gunakan oleh adanya program dan kegiatan yang di rencanakan. Belanja langsung ini merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Pengeluaran ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi (Haryanto, 2013).

2.1.8 Teori Investasi

Investasi merupakan kegiatan dalam menanamkan modal dana dalam suatu bidang tertentu. Investasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satu di antaranya adalah investasi dalam bentuk saham. Pemodal atau investor dapat menanamkan kelebihan dananya dalam bentuk saham di pasar bursa. Tujuan utama investor dalam menanamkan dananya ke bursa efek yaitu untuk mencari pendapatan atau tingkat pengembalian investasi (*return*) baik berupa pendapatan dividen maupun pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya (*capital gain*).

Penggunaan modal baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) digunakan bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya dan dilakukan secara langsung. Yakni melalui pembelian-pembelian obligasi, surat-surat kertas perbendaharaan negara, emisi-emisi lainnya (saham-saham) yang dikeluarkan oleh perusahaan serta deposito-deposito dan tabungan yang berjangka panjang sekurang-kurangnya satu tahun. Harrod dan Dommar memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya

mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan, dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (Jhingan, 2000).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam Arliman (2018) menyebutkan definisi modal dalam negeri adalah “modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum”. Penanaman Modal Dalam Negeri menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 adalah “kegiatan untuk menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penanaman modal dalam negeri yaitu suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan penanam modal dengan menggunakan modal dalam negeri di wilayah negara Indonesia.

Sunariyah dalam Apriyan (2018) mengatakan investasi adalah suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Sedangkan definisi investasi menurut Ramadhan, (2016), Investasi dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha (termasuk lembaga perbankan) yang memiliki kelebihan dana. Investasi dapat dilakukan baik di pasar uang maupun pasar modal ataupun ditempatkan sebagai kredit pada masyarakat yang membutuhkan.

Investasi menurut Sukirno (2012) investasi memungkinkan masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja,

meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

2.2 Hubungan antar Variabel

2.2.1 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan, kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi kehidupan yang baik, terpenuhi kebutuhan materi untuk hidup, kebutuhan spiritual, kebutuhan sosial seperti terjadinya sesuatu tatanan yang teratur, dapat mengelola konflik dalam kehidupan keseharian, terjamin dari segi keamanan, dan setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (keadilan terjamin) terjaganya kesenjangan sosial ekonomi. *United Nations Development Programme (UNDP)* mulai tahun 1990 telah menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan.

John Maynard Keynes, mengemukakan pandangan dan menulis buku yang pada akhirnya menjadi landasan teori ekonomi makro modern (*The General Theory of Employment Interest and Money*). Teori Keynes berfokus pada permintaan agregat efektif di dalam negeri yang membentuk pengeluaran untuk konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah yang akan menimbulkan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Menurut Keynes pemerintah dapat menstimulus ekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal. Teori Keynes melihat hubungan antara kecenderungan pengeluaran pemerintah daerah (dalam hal ini belanja modal pemerintah) dengan pertumbuhan ekonomi.

Grand theory Kesejahteraan yaitu Welfare State menurut Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah „utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.

Pembangunan manusia di Indonesia diharapkan dapat terus meningkat, terutama setelah ditetapkannya peraturan otonomi daerah. Peraturan tentang otonomi daerah yang diamanahkan melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan program-program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran, agar indeks pembangunan manusia ikut meningkat.

Tujuan otonomi daerah diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wegner dalam Soetrisno (1984) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan pemerintah dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi. Ini salah satu dari tujuan pelaksanaan otonomi daerah yang diimplementasikan pada pengeluaran belanja rutin. Kenaikan pengeluaran pemerintah yang direncanakan akan menyebabkan penambahan permintaan agregat, dimana permintaan agregat akan mendorong produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan juga akan meningkat. Kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan ketepatan arah investasi ke

daerah-daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Swaramarinda & Indriani (2011). menyatakan kekuatan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia harus bisa mengidentifikasi sektor prioritas seperti pendidikan dan kesempatan kerja yang mempunyai potensi paling tinggi untuk meningkatkan pembangunan manusia. Pertumbuhan pendapatan adalah salah satu sebagai kontributor utama untuk langsung meningkatkan kemampuan individu dan akibatnya perkembangan manusia bangsa sejak ini merangkum perintah ekonomi atas sumber daya (Ranis, 2004). Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif.

Menurut Saputra & Mahmudi (2012), dalam suatu lingkaran setan kemiskinan terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin yaitu 1) rendahnya tingkat kesehatan, 2) rendahnya pendapatan, dan 3) rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat kesehatan merupakan salah satu pemicu terjadinya kemiskinan karena tingkat kesehatan masyarakat yang rendah akan menyebabkan tingkat produktivitas menjadi rendah. Tingkat produktivitas yang rendah lebih lanjut menyebabkan pendapatan rendah, dan pendapatan yang rendah menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemiskinan itu selanjutnya menyebabkan seseorang tidak dapat menjangkau pendidikan yang berkualitas serta membayar biaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan.

Menurut *Center for the Study of Living Standards* (2001) dalam Toyamah & Usman (2004) menyatakan bahwa pendidikan adalah elemen penting untuk memerangi kemiskinan, memberdayakan perempuan, serta menyelamatkan anak-anak dari upaya eksploitasi. Demikian juga pernyataan dari UNICEF yang

mengatakan bahwa pendidikan adalah investasi yang penting untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi.

investasi publik di bidang pendidikan dan kesehatan akan memberikan kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber daya manusia (SDM) handal yang sehat menjadi semakin bertambah. Meningkatnya kesehatan dan pendidikan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan bertambahnya kesempatan kerja.

2.2.2 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan. Menurut Sukirno (2013), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka panjang. Tiga komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi Todaro & Smith (2003), yakni: (1) akumulasi modal; (2) pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja; dan (3) kemajuan teknologi.

Grand theory Kesejahteraan yaitu Welfare State menurut Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah „utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.

Dilihat dari sasarannya, secara umum pengeluaran pemerintah dibagi dalam 2 (dua) kelompok. Pertama, pengeluaran pemerintah yang secara langsung memberi kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia. Sasaran ini dapat diwujudkan melalui pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan, karena kedua sektor ini menyangkut kebutuhan dasar manusia. Kedua, pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Dalam mewujudkan sasaran ini, pengeluaran pemerintah biasanya dialokasikan untuk membenahi infrastruktur karena seluruh aktivitas ekonomi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Beberapa upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi penduduk miskin diantaranya ditempuh melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Menurut Sukirno (2013), pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui instrumen anggaran. Pengeluaran pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk peningkatan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Haryanto, 2013; Sukirno, 2013).

2.2.3 Hubungan antara Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat

Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua dalam tingkat pengeluaran agregat. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal serta

perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang.

Dalam teori Investasi Harrod-Domar, pembentukan modal atau investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan. Menurut Harrod-Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Pada kegiatan investasi terdapat hubungan yang erat terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru, karena akan memunculkan kegiatan produksi yang meningkat sehingga masyarakat yang terserap akan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Harrod dan Domar dalam Jhingan (2016), menyatakan bahwa investasi merupakan peranan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya dua sifat yang dimiliki investasi. Pertama, investasi menciptakan pendapatan dan kedua, memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Yang pertama dapat disebut dampak permintaan dan yang kedua dampak penawaran investasi. Karena itu, selama investasi bersih tetap berlangsung pendapatan nyata atau output senantiasa membesar. Namun demikian, untuk mempertahankan tingkat equilibrium pendapatan pada pekerjaan penuh dari tahun ketahun baik pendapatan nyata maupun output tersebut keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada satu kapasitas produktif modal meningkat.

2.3 Kajian Empiris

Pratiwi & Indrajaya (2019) menulis tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan adalah *Path Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Bali. Sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah dan penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali, dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Penyerapan tenaga kerja memediasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali, sedangkan penyerapan tenaga kerja tidak memediasi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali tahun 2013-2017.

He & Feng (2018) menulis tentang *A Study on the Determinants of Social Welfare: Evidence from Macroeconomics*. Hasil penelitiannya menunjukkan Melalui analisis empiris, dapat disimpulkan bahwa PDB riil, pendapatan riil dan tingkat keterbukaan merupakan determinan pendorong untuk memperbesar kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, inflasi merupakan determinan obstruktif untuk menurunkan kesejahteraan sosial

S. D. Putri, Anis, & Triani (2019) menulis tentang pengaruh ketenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan infrastruktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia (2) pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap

kesejahteraan masyarakat di Indonesia (3) infrastruktur jalan berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. (4) tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, dan infrastruktur jalan secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Mulyana & Warsilan (2020) menulis tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Berau. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis). Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah secara langsung tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Berau sedangkan Investasi Swasta secara langsung memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Berau. Pengeluaran pemerintah secara langsung memiliki pengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Berau sedangkan Investasi Swasta secara langsung memiliki pengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Berau. Pertumbuhan Ekonomi secara langsung tidak memiliki pengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Berau. Pengeluaran Pemerintah secara tidak langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Berau sedangkan Investasi Swasta secara tidak langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Berau.

Pambudy & Syairozi (2019) meneliti tentang analisis peran belanja modal dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal pengeluaran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi

swasta berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Asiri (2016) menulis tentang pengaruh belanja modal dan investasi swasta terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Utara periode 2003-2013. Hasil penelitian menunjukkan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja, investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja, belanja modal dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan melalui kesempatan kerja sebagai variabel intervening.

Ariwuni & Kartika (2019) menulis tentang pengaruh PDRB dan pengeluaran pemerintah terhadap IPM dan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dari ketiga variabel bebas berupa PDRB, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu IPM. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel IPM merupakan variabel yang memediasi pengaruh PDRB, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan.

Tampubolon (2019) menulis tentang pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sulistiawati (2012) menulis tentang pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan adalah *Path Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kedua, investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja penyerapan. Ketiga, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Keempat, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kelima, tenaga kerja penyerapan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial.

Putri & Soelistyo (2018) penelitiannya berjudul analisis pengaruh upah, PDRB dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di kawasan gerbangkertasusila tahun 2012-2016. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Upah berpengaruh negatif sebesar -0.069927 dan signifikan, variabel PDRB berpengaruh negatif sebesar -0.253666 dan signifikan, sedangkan variabel investasi berpengaruh Positif sebesar 0.599640 terhadap penyerapan tenaga kerja.

Lokiman, Rotinsulu, & Luntungan (2014) menulis tentang pengaruh upah minimum Provinsi dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja dan dampaknya pada PDRB (ADHK) di Kota Manado tahun 2003-2012. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis path. Hasil penelitian menunjukan bahwa upah minimum provinsi dan investasi swasta memiliki pengaruh secara-bersama sama terhadap tenaga kerja. Secara parsial upah minimum memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja sedangkan investasi swasta tidak memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja. Besarnya pengaruh UMP ke PDRB melalui

tenaga kerja bersifat positif, sedangkan investasi swasta ke PDRB melalui tenaga kerja bersifat negatif.

Wilis (2015) meneliti tentang analisis pengaruh upah minimum, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja berdasarkan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis data panel dan metode *Fixed Effect Model* (FEM). Hasilnya menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap tenaga kerja terdidik, pekerjaan terlatih dan pekerjaan tidak berpendidikan dan tidak terlatih. Daerah variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pekerjaan terdidik, pekerjaan terlatih dan pekerjaan tidak berpendidikan dan tidak terlatih. Lokal variabel investasi berpengaruh positif signifikan terhadap tenaga kerja terlatih, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pekerjaan terdidik dan tidak terdidik dan pekerjaan yang tidak terlatih. Variabel penanaman modal asing tidak signifikan mempengaruhi lapangan kerja terdidik, lapangan kerja terlatih dan tidak terdidik dan pekerjaan yang tidak terlatih. Dan variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pekerjaan terdidik dan tidak berpendidikan dan tidak terlatih pekerjaan, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pekerja terlatih.

Biamrillah & Nurhayati (2018) analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di daerah Karesidenan Semarang. Alat analisis menggunakan panel regresi data. Hasil analisis menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah model efek acak (REM). Produk Domestik Bruto (PDRB) variabel dan populasi berpengaruh positif, sedangkan inflasi dan UMK tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah Karesidenan Semarang.

Sulistiawati (2012) menulis penelitian tentang pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di provinsi di Indonesia. penelitian tersebut menggunakan model analisis jalur di bawah SPSS 17.0 dengan variabel terdiri dari upah minimum, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah, (1) upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, (2) penyerapan tenaga kerja memiliki nilai positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial.

Putri & Soelistyo (2018) menulis penelitian tentang analisis pengaruh upah, PDRB dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di kawasan gerbangkertasusila tahun 2012-2016. Penelitian tersebut menggunakan model random effect (REM) dengan menggunakan data panel, gabungan dari *time series* dan *cross sections*. Penelitian ini menggunakan 6 Kabupaten/Kota di Kawasan Gerbangkertasusila tahun 2012-2016. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Upah berpengaruh negatif sebesar -0.069927 dan signifikan, variabel PDRB berpengaruh negatif sebesar -0.253666 dan signifikan, sedangkan variabel investasi berpengaruh Positif sebesar 0.599640 terhadap penyerapan tenaga kerja.

Bubi, Zakiah & Marpaung, (2018) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi swasta, dan produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kalimantan. Penelitian data sekunder berupa data panel tahun 2005-2016. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja,

PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian secara simultan pengeluaran pemerintah, investasi swasta, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Lokiman, Rotinsulu, & Luntungan (2014) Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Path dengan sumber data sekunder yang diambil dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan upah minimum provinsi dan investasi swasta memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap tenaga kerja. Secara parsial upah minimum provinsi memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja sedangkan investasi swasta tidak memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja. Besarnya pengaruh upah minimum provinsi ke PDRB melalui tenaga kerja bersifat positif, sedangkan investasi swasta ke PDRB melalui tenaga kerja bersifat negatif.

Kamar (2017) menulis penelitian tentang analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tangerang pada tahun 2009-2015. Hasil analisis menunjukkan secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif atau terbalik arahnya serta tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara simultan, pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh positif dan searah serta signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Budiarto & Dewi (2015) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara langsung maupun tidak langsung PDRB dan upah minimum provinsi terhadap investasi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis jalur (path analysis). Hasil analisis data menunjukkan, bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap investasi dan tingkat penyerapan tenaga kerja. Upah minimum berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap investasi dan

penyerapan tenaga kerja. Investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Investasi bukan merupakan variabel mediasi pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja dan bukan merupakan variabel mediasi pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja.

Nizar, Hamzah, & Syahnur (2013) menulis penelitian tentang pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDB) terhadap tingkat kemiskinan secara langsung sangat kecil namun hubungannya negatif dan signifikan. FDI, investasi pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pengaruh estimasi pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan juga tidak begitu besar namun hubungannya negatif dan signifikan. Untuk itu pemerintah hendaknya tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja akan tetapi lebih daripada itu pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dan berkeadilan yaitu pertumbuhan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Habiburrahman (2012) mengkaji penelitian pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Penyerapan tenaga kerja juga bergantung pada PDRB. Dan penelitian ini juga menemukan bahwa meningkatkan PDRB merupakan strategi dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung.

Ziyadaturrofiqoh, Zulfanetti, & Safri (2018) menulis penelitian tentang pengaruh PDRB, upah minimum provinsi. Dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan PDRB, UMP, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi periode 1997-

2015. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel bebas yang diteliti mampu menjelaskan 91 persen terhadap penyerapan tenaga kerja dan sisanya 9 persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Secara parsial PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi, sedangkan UMP dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan.

Awandari & Indrajaya (2016) penelitiannya tentang pengaruh infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja di Provinsi Bali. Hasil analisis menunjukkan bahwa infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dan investasi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja di Provinsi Bali.